

## RINGKASAN

**Asih Widi Lestari, 2013. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kudus). Dosen Pembimbing : Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si dan Ainul Hayat, S.Pd, M.Si.**

---

Upaya penegakan disiplin pegawai negeri di Lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini ditentukan mengenai penegakan disiplin melalui pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja. Tujuan adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai di seluruh pegawai negeri Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hasil wawancara pra-riset yang dilakukan, terdapat permasalahan kedisiplinan pegawai di KPPN Kudus sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 ini. Dari hal ini, maka dalam penelitian ini mengangkat tiga permasalahan yaitu *Pertama* bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus, *kedua* bagaimanakah dampak implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus, dan *ketiga* apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01.2011 di KPPN Kudus sudah berhasil, dilihat dari peran dan komunikasi aktor yang baik; mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan; serta keberadaan mesin absen elektronik/*Handkey* yang berfungsi baik di KPPN Kudus. Impelementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 ini di KPPN Kudus, ternyata membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai di KPPN Kudus. Hal ini dilihat dari adanya meningkatnya kedisiplinan waktu dan keteraturan kerja pegawai KPPN Kudus sehingga berdampak pada ketepatan dan kecepatan pegawai KPPN Kudus dalam melaksanakan tugas/ pekerjaannya. Adapun Faktor pendukungnya adalah : Rincinya isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor

214/PMK.01/2011; Sikap dari pegawai KPPN Kudus yang bersedia menerima segala ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011; dan Suasana dan Kondisi KPPN Kudus yang nyaman. Dan yang menjadi faktor penghambatnya adalah Faktor di luar dugaan yang terjadi pada pegawai; dan Beban kerja dari penanggung jawab sistem kehadiran elektronik unit kerja di KPPN Kudus terlalu besar.

Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai KPPN Kudus menunjukkan bahwa dalam upaya mereformasi sebuah birokrasi tidak hanya diperlukan sebuah pemberian *reward* saja (pemberian TKPKN), tetapi juga diperlukan sebuah *punishment* juga yakni berupa pemotongan TKPKN bagi individu yang melakukan pelanggaran kedisiplinan waktu, sehingga kebijakan ini dapat dijadikan contoh untuk pembuatan regulasi baru dalam menanggulangi permasalahan kedisiplinan yang umumnya terjadi di seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia.

Namun Masih terdapat celah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011, yaitu tidak adanya sistem absen elektronik pada saat jam istirahat kerja. Hal ini menyebabkan beberapa pegawai di KPPN Kudus masih terlambat kembali ke kantor setelah jam istirahat kerja selesai. Meskipun keterlambatan hanya berkisar antara 5-10 menit, tapi tetap saja hal ini merupakan sebuah pelanggaran jam kerja, untuk itu diperlukan penyempurnaan dalam peraturan ini dengan membuat ketentuan absen elektronik untuk jam istirahat. Yaitu pemberlakuan absen elektronik saat keluar dan masuk kembali pada jam istirahat, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap jam istirahat kerja.



## SUMMARY

**Asih Widi Lestari. 2013. Implementation of Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 About Discipline Enforcement Based on Remuneration/ TKPKN at Finance Ministry Area (A Study at Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kudus). Advisors: Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si dan Ainul Hayat, S.Pd, M.Si.**

---

Discipline enforcement of civil servants in Finance Ministry has been defined in Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011. In this regulation determined about enforcement discipline through cutting remuneration against civil servants in Finance Ministry area who commits an offense of the working hours. The purpose in this regulation is to increase the discipline civil servants in Finance Ministry area. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus is a part of Finance Ministry possessed by the Directorate General of Treasury. In the result of pre-research interview, there are discipline problem of civil servants in KPPN Kudus before this regulation is formulated. From this problem, so this research has three research question, there are: First, How the implementation Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus; Second, What is the impact of implementation Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 to increase discipline civil servants in KPPN Kudus; Third, What is support and inhibitor factors the implementation Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus.

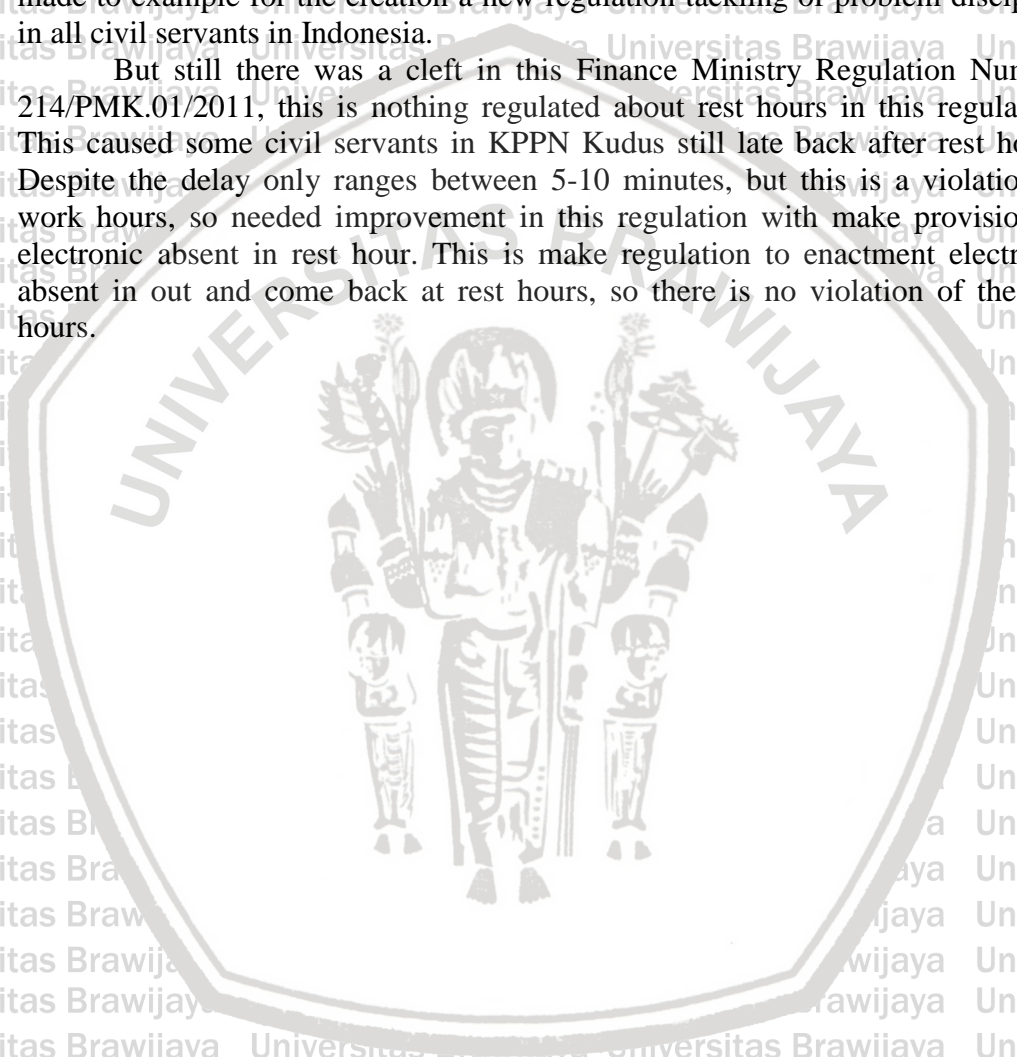
This research is using a descriptive research type with qualitative approach. The data source is from primary data and secondary data. The data collecting technique is observation, interview, and documentation. The data analysis technique is data collecting; interpretation data, data reduction, and concluding.

This research resulted conclusion that the implementation of Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus was successfully, its viewed from good role and communication between actors; the mechanism is accordance with the provisions; and as well as existence of a absent electronic machine functioned in KPPN Kudus. Implementation of Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus has given positive impact to increase discipline civil servants in KPPN Kudus. Its viewed from increase discipline time and regularity of work civil servants in KPPN Kudus and that have impact in exactness and speed time civil servants in KPPN Kudus to carryout the work/ tasks. The support factors of the implementation of Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus are the contents of the Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 is detail; the attitude civil servants in KPPN Kudus is willing to receive all provisions contained in Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011; and the comfortable conditions in KPPN Kudus. And the support factors of the implementation of Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 in KPPN Kudus are a outside factors is alleged happened to civil servants in KPPN

Kudus; and the workload of a caretaker absent electronic system in KPPN Kudus is too overload.

The successfully of implementation Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011 to increase discipline civil servants in KPPN Kudus indicating that in efforts to bureaucracy reform is not only required giving the reward only (remuneration), but also required a punishment which is cutting the remuneration to civil servants commits an offense discipline of time, so this regulation can made to example for the creation a new regulation tackling of problem discipline in all civil servants in Indonesia.

But still there was a cleft in this Finance Ministry Regulation Number 214/PMK.01/2011, this is nothing regulated about rest hours in this regulation. This caused some civil servants in KPPN Kudus still late back after rest hours. Despite the delay only ranges between 5-10 minutes, but this is a violation of work hours, so needed improvement in this regulation with make provision of electronic absent in rest hour. This is make regulation to enactment electronic absent in out and come back at rest hours, so there is no violation of the rest hours.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku ketua pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, nasehat serta kesabaran yang besar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tahapan skripsi.
4. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan, setia membagi ilmunya kepada penulis guna penyelesaian karya tulis skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus atas kerja sama dan bantuannya selama penelitian ini.

8. Bapak dan Ibuku, Bapak Kusmen, SH dan Ibu Eny Rahayu atas limpahan kasih sayangnya dan telah memberikan dukungan baik moral maupun material dan doanya kepadaku sampai saat ini juga dalam penulisan skripsi ini.
9. Calon suamiku tercinta, Alutfi Khoirul, yang selalu setia dan memberikan dukungan kepadaku.
10. Mbak dan Kakak Iparku, Mbak Ani dan Mas Agung serta keponakanku yang nakal Dek Fakhri.
11. Sahabat-sahabatku tersayang Dame, Awwin, Ayu, Bella, Ardit, Heni, Aak Sipul, maupun teman-teman FIA UB 2009 yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kedua sahabat kecilku tersayang Risma dan Dewi, serta Koko Donny, Sinok Vera, dan Yossy yang setia menemani dan memberikan semangat serta dorongan sampai terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-temanku anak-anak Fast Track dan Double Degree, Fata, Susi, Miftah, Nasrun, Ismuhadi, Mbak Agit, Mbak Friska, dan Mbak Ilul, yang berjuang bersama-sama mendapatkan gelar M.AP.
14. Serta terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan dan dukungannya terhadap karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya.

Akhir kata, hanya ini yang dapat penulis sampaikan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Januari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>SUMMARY</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik .....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	14
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	17
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	19
4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik .....	20
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik .....	27
B. Administrasi Kepegawaian Negara .....	29
1. Pengertian Administrasi Kepegawaian Negara .....	29
2. Fungsi Administrasi Kepegawaian Negara .....	30
3. Kegiatan dalam Administrasi Kepegawaian Negara .....	31
4. Pegawai Negeri Sipil .....	35
C. Disiplin .....	38
1. Pengertian dan Tujuan Disiplin .....	38
2. Jenis-Jenis Disiplin .....	40
3. Peraturan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	42
D. Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) ....	44
1. Pengertian dan Tujuan Disiplin .....	44
2. Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Fokus Penelitian .....	48

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	50
D. Jenis dan Sumber Data .....	51
E. Pengumpulan Data .....	55
F. Instrumen Penelitian .....	58
G. Analisis Data .....	59

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....**

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus .....	64
B. Kementerian Keuangan .....	70
C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan .....	75
D. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus .....	80
E. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	91
1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus .....	91
2. Dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 terhadap Peningkatan Kedisiplinan Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus .....	154
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus .....	159
F. Analisis dan Pembahasan .....	180
1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus .....	180
2. Dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 terhadap Peningkatan Kedisiplinan Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus .....	190
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus .....	192

#### **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	201
B. Saran .....	204

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN .....**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Daftar Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Kementerian Keuangan	5
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan Tahun 2011	65
Tabel 4.2	Banyaknya Desa/ Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Duku Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2011	66
Tabel 4.3	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2011	67
Tabel 4.4	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2011	68
Tabel 4.5	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kudus Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011	69
Tabel 4.6	Pegawai KPPN Kudus Berdasarkan Pangkat dan Golongan	89
Tabel 4.7	Pegawai KPPN Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan	90
Tabel 4.8	Presentase Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai yang Terlambat Masuk Bekerja	106
Tabel 4.9	Presentase Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai yang Pulang Sebelum Waktunya	107
Tabel 4.10	Presentase Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai yang Terlambat Masuk Bekerja yang	110

Berlokasi Kerja di Provinsi Daerah Khusus  
Ibu Kota Jakarta

Tabel 4.11	Presentase Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai yang Pulang Sebelum Waktunya yang Berlokasi Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	111
------------	--	-----

Tabel 4.12	Tingkat Hukuman Disiplin Berdasarkan Jumlah Ketidakhadiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	131
------------	--	-----

Tabel 4.13	Ketentuan Pemotongan TKPKN Bagi Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	133
------------	---	-----

Tabel 4.14	Ketentuan Pemotongan TKPKN Berdasarkan Mekanisme Cuti PNS	135
------------	--	-----

Tabel 4.15	Keterangan Status Absensi Pegawai dan Potongan TKPKN Pegawai pada LB.1 KPPN Kudus Periode Tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan 22 September 2012	141
------------	--	-----

Tabel 4.16	Keterangan Status Absensi pada LB.2 KPPN Kudus Periode Tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012	146
------------	--	-----

Tabel 4.17	Presentase Jumlah Pegawai yang Dikenakan Kategori TL/ PSW Periode Bulan Agustus, September, Oktober 2012	166
------------	--	-----

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Variabel-variabel Proses Implementasi Kebijakan	26
Gambar 3.1	Analisis Model Interaktif	61
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Kudus	64
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kementerian Keuangan	74
Gambar 4.3	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus	82
Gambar 4.4	Wilayah Kerja KPPN Kudus	85
Gambar 4.5	Bagan Organisasi KPPN Kudus	88
Gambar 4.6	Foto Bapak Gatot Kuncoro yang Bertugas Sebagai Operator di KPPN Kudus	98
Gambar 4.7	Salinan Surat Keputusan Kepala KPPN Kudus Nomor KEP 020/ WPB.14/ KP.129/ 2012	99
Gambar 4.8	Contoh Salinan Surat Izin/ Pemberitahuan Karena Alasan Penting	117
Gambar 4.9	Contoh Salinan Surat Izin/ Pemberitahuan TL (Terlambat Masuk Kerja)	118
Gambar 4.10	Contoh Salinan Surat Izin/ Pemberitahuan PSW (Pulang Sebelum Waktu)	119
Gambar 4.11	Contoh Salinan Surat Keterangan Tidak Mengisi Daftar Hadir Masuk	123
Gambar 4.12	Contoh Salinan Surat Pernyataan Tidak Mengisi Daftar Hadir Pulang	124
Gambar 4.13	Contoh Salinan Surat Izin Keluar Kantor	126

Gambar 4.14	Mesin Kehadiran Elektronik atau <i>Handkey</i> di KPPN Kudus	152
Gambar 4.15	Salinan Surat S-255/PB.1/UP.10/2009	153
Gambar 4.16	Bagian Depan KPPN Kudus	168
Gambar 4.17	Ruang Pelayanan KPPN Kudus	169
Gambar 4.18	Ruang Kerja Staf Lantai Bawah KPPN Kudus	169
Gambar 4.19	Ruang Kerja Staf Lantai Atas KPPN Kudus	170
Gambar 4.20	Ruang Kerja Sever KPPN Kudus	170
Gambar 4.21	Ruang Kepala KPPN Kudus	171
Gambar 4.22	Ruang Kepala Seksi Pencairan Dana dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi	171
Gambar 4.23	Ruang Kepala Seksi Bank/ Giro Pos KPPN Kudus	172
Gambar 4.24	Ruang Kepala Sub.Bagian Umum KPPN Kudus	172
Gambar 4.25	Aula Pertemuan KPPN Kudus	173
Gambar 4.26	Musholla KPPN Kudus	173
Gambar 4.27	Susunan Organisasi Sub Bagian Umum KPPN Kudus	189
Gambar 4.28	Matriks Hasil Penelitian	200

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Jumlah Halaman
Lampiran I	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan	20
Lembar II	Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-10/SJ/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan	17
Lampiran III	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-22/PB/2012 Tentang Pedoman Pelaporan Administrasi Kehadiran Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	25
Lampiran IV	Contoh Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai (LB.1) di KPPN Kudus	4

Lampiran  
V

Contoh Laporan Bulanan  
Ketertiban Pegawai (LB.2) di  
KPPN Kudus

8

Lampiran  
VI

Contoh Laporan Bulanan  
Perorangan (LB.3) di KPPN  
Kudus

3

Lampiran  
VII

Contoh Laporan Harian  
Kehadiran Pegawai (LH.1) di  
KPPN Kudus

3

Lampiran  
VIII

Laporan Harian Ketidakhadiran  
Pegawai (LH.2) di KPPN Kudus

2

Lampiran  
IX

Curriculum Vitae

3

